



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024-2026**



**KANTOR KECAMATAN JOGOROTO
JLN. RAYA JOGOROTO NO. 1 TELP. 0321-864403**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto dilator belakang oleh Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, tertanggal 23 Juni 2023 dan Berdasarkan hasil zoom oleh Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 20 Juni 2023, notifikasi pemutakhiran pada dashboard SIPD-RI serta rekomendasi hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagaimana lampiran Surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor: 050/10.745/201.2/2023 tanggal 22 Juni 2023 disebutkan bahwa: Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2024 dan SIPD sebagaimana tindak lanjut Radiogram Ditjen Bangda Kemendagri tanggal 19 Juni 2023 Nomor: 600.2.1/7230 tentang Diseminasi Permendagri tentang RKPD Tahun 2024.

Harapan kami semoga Perubahan Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2024-2026 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jogoroto, 3 April 2023

Camat Jogoroto

NUNIK HIDYATI, ST

Pembina

NIP. 196908141997032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JOGOROTO	7
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Kecamatan Jogoroto ...	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan Jogoroto.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jogoroto.....	20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	58
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JOGOROTO	61
3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jogoroto ...	61
3.2 Isu Strategis	62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	64
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jogoroto	64
4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Jogoroto	66
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	76
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jogoroto...	76
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	85
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	106
BAB VIII PENUTUP	108

Lampiran - Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah. Perencanaan memberi kesempatan pula untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih. Perencanaan juga merupakan alat ukur untuk melakukan evaluasi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Tugas Pokok Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang tertuang didalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, Kecamatan adalah mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jogoroto Tahun 2024 - 2026 merupakan tindak lanjut Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, tertanggal 23 Juni 2023.

Berdasarkan hasil zoom oleh Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 20 Juni 2023, notifikasi pemutakhiran pada dashboard SIPD-RI serta rekomendasi hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagaimana lampiran Surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor: 050/10.745/201.2/2023 tanggal 22 Juni 2023 disebutkan bahwa: Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan

daerah pada RKPD Tahun 2024 dan SIPD sebagaimana tindak lanjut Radiogram Ditjen Bangda Kemendagri tanggal 19 Juni 2023 Nomor: 600.2.1/7230 tentang Diseminasi Permendagri tentang RKPD Tahun 2024

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renstra 2024-2026 berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, tertanggal 23 Juni 2023.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Jogoroto setiap Tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, dan program yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, tertanggal 23 Juni 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto Tahun 2024 - 2026 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ⁱⁱⁱ2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor /)
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
21. Surat Bupati Jombang Nomor 050/8051/415.42/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan setiap tahun anggaran. Rencana strategis Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh komponen pemerintah Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Renstra Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang yang harus dilaksanakan guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan *P e r u b a h a n* Renstra Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menyelaraskan Dokumen Perencanaan dengan Konsep Pembangunan Nasional serta sebagai salah satu dokumen acuan resmi bagi Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur perencana pembangunan daerah;
3. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Kecamatan Jogoroto;
4. Mendukung seluruh jajaran Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 3 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Jogoroto ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar hukum penyusunan
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JOGOROTO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Jogoroto
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Jogoroto
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jogoroto
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JOGOROTO

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jogoroto
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Jogoroto
- 4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Jogoroto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jogoroto

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JOGOROTO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Jogoroto dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Melaksanakan ⁱⁱⁱkegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;

- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
 - Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
 - Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
 - Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
 - Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
 - Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
 - Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
 - Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
 - Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
 - Memelihara dan ⁱⁱⁱ mengamankan dokumen administrasi keuangan;

- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi produk hukum desa;
- j. Melaksanakan pembinaan tata kelola keuangan desa dan aset desa;
- k. Melaksanakan pembinaan dan monitoring SID (Sistem Informasi Desa);
- l. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan LPPDes dan LKPJ
- m. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainⁱⁱⁱ yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi lembaga ekonomi desa seperti BUMDes, UPK, BKD, Pasar Desa; dan
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lembaga masyarakat desa seperti PKK, LPMD, KPMD, dan Pokmas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kemiskinan melalui program – program bantuan sosial;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan PHBN dan PHBA;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

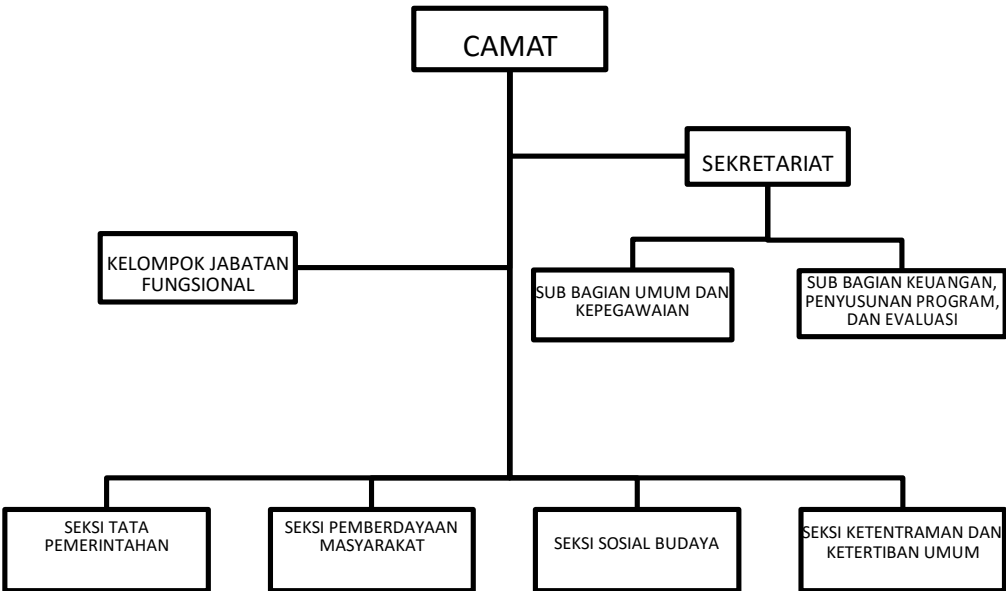
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Jogoroto tersaji dalam Gambar 2.1. Sedangkan rincian personil pegawai, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang per bulan Januari 2023 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan
Jogoroto



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45Tahun 2019

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Aparatur Kecamatan sebagai unsur pemerintah sebagai pelayan masyarakat sudah pasti akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/keurahan, masyarakat maupun organisasi pemerintah daerah diatasnya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, aparatur kecamatan dituntut berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka untuk mencapai kodisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/ sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi serta loyalitas.

Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Eselon dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	7
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-
Jumlah		15

Sumber Data: SIAP ASN

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kantor Kecamatan Jogoroto yang terbanyak golongan III, sebanyak 7 orang. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana, baik dengan latar belakang teknis maupun sosial.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Eselon

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	-
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	6
4	Pelaksana	7
Jumlah		15

Sumber Data: SIAP ASN

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

Golongan	Jumlah Pegawai
SLTA	4
Diploma (D3)	-
Sarjana (S1)	8
Magister (S2)	3
Jumlah	15

Sumber Data: SIAP ASN

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang paling banyak adalah Sarjana, yang rata-rata pada posisi jabatan struktural eselon III dan IV. Peningkatan kapasitas ASN melalui peningkatan jenjang pendidikan mempengaruhi kualitas pelayanan dan pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

Sedangkan bila dilihat dari komposisi pegawai Kantor Kecamatan Jogoroto berdasarkan pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal

No.	Jabatan	Jenis Diklat		
		Struktural / Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
1	Struktural	Diklatpim III: 2 orang Diklatpim IV: 3 orang	-	-
2	Fungsional Khusus	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-

Sumber Data: SIAP ASN

Saat ini Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang menempati gedung kantor yang berada di Jl. Raya Jogoroto No. 1 Kec. Jogoroto. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Inventaris Barang

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas R2	9	9	-	-
3	Kendaraan Dinas R2 (Desa)	11	11	-	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Scanner	2	1	1	
2	AC	8	7		1
3	Mesin Tik manual	1	-	-	1
4	Rak Besi	2 ⁱⁱⁱ	2		-
5	Filling Besi	6	5	-	1

6	Rak Kayu	3	2	1	
7	White Board	1	-	1	
8	Lemari Kayu	6	5	1	
9	Zice	2	2	-	
10	Tempat Tidur Kayu	2	2	-	
11	Meja Rapat	0	0	0	
12	Meja Tulis	20	15	5	
13	Kursi Rapat	0	0		0
14	Kursi Biasa	10	10		
15	Kursi Besi	180	150	-	30
16	Bangku Tunggu	4	4		

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
17	Kursi Lipat	0	0	0	
18	Meja Komputer	1	1		
19	Jam	2	2		
20	Kipas Angin	4	4	-	
21	Kompore Gas	1	1		
22	Alat Dapur lainnya	1 set			
23	Televisi	2	2		
24	Podium	2	1		1
25	P C	3	2		1
26	Laptop	10	7		3
27	Notebook				
28	Printer	7	4	1	2
29	CPU	0	0		
30	Monitor	-			
31	Meja kerja pejabat eselon III	2	2		
32	Kursi kerja pejabat eselon III	2	2		
33	Kursi kerja pejabat eselon IV	10	10		
34	Camera + attachment	1			1
35	Telephone Hybrid				
36	Mesin Pres	-	-		
37	Soundsystem	4	2	2	
38	Tape recorder	2		1	
39	Adaptor	-		-	
40	Alat pemadam kebakaran	3	0	3	

Sumber Data: Daftar Inventaris Barang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jogoroto
Tahun 2018 s/d 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	NILAI IKM				81,95	83,46	84,15	86,15	87,75	82,04	83,74	96,25	N/A	N/A	106,05	100,41	117,23	N/A	N/A
2	Nilai Sinergitas Kecamatan Jogoroto Minimal BAIK				76	69	70	71	72	60,00	60,39	71,00	N/A	N/A	113,77	100,01	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa				22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum				8	8	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11	11	N/A	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya				16	16	N/A	N/A	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
7	Nilai Evaluasi SAKIP				60,1	62,5	70,01	N/A	N/A	N/A	N/A	65,89	70,35	N/A	N/A	67,68	104,17	N/A	N/A
8	Persentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
9	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				20	18	N/A	N/A	N/A	20	18	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
11	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional				-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
12	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang direhab				162 m2	2 keg	2 Keg	2 keg	2 keg	162	-	1 keg	N/A	N/A	100	100	50,00	N/A	N/A
13	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang terbangun				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
14	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				10	4	4	4	4	4	3	2	12	N/A	95,00	50,00	130	N/A	N/A
15	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang dipelihara				162 m2	2 keg	2 Keg	2 keg	2 keg	162	-	1 keg	N/A	N/A	100	100	50,00	N/A	N/A
16	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				6	6	N/A	N/A	N/A	4	2	2	N/A	N/A	92	45	100	N/A	N/A
17	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
18	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian				20	-	N/A	N/A	N/A	19	-	N/A	N/A	N/A	98,65	-	N/A	N/A	N/A
19	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah Dokumen Renstra Kec. Jogoroto yang tersusun				-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
21	Jumlah Dokumen Renja Kec. Jogoroto yang tersusun				2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
22	Jumlah dokumen Laporan LKJIP yang tersusun				1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
23	Jumlah dokumen laporan keuangan Kec. Jogoroto yang tersusun				2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
24	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				N/A	N/A	66	73,39	76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Nilai SAKIP				60,1	62,5	70,01	N/A	N/A	N/A	N/A	65,89	70,35	N/A	N/A	67,68	104,17	N/A	N/A
26	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/a	N/a	100%	100%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
27	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				N/a	N/a	100%	100%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
28	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				N/a	N/a	3	3	3	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
29	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				N/a	N/a	1	1	5	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
30	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				N/a	N/a	100%	100%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
31	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				N/a	N/a	100%	100%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
32	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Jogoroto yang difasilitasi				N/a	N/a	12	12	14	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
33	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				N/a	N/a	0	12	12	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
34	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD				N/a	N/a	1	1	1	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
35	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD.....				N/a	N/a	0%	0%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
26	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi				N/a	N/a	0	0	22	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
37	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				N/a	N/a	100%	100%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
38	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				N/a	N/a	12	12	12	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
39	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				N/a	N/a	11	0	11	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
40	1. Jumlah pemenuhan barang cetak 2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan				N/a	N/a	-	-	-	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
41	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan				N/a	N/a	12	12	12	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
42	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				N/a	N/a	-	-	-	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
43	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.				N/a	N/a	6	6	6	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
44	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur				N/a	N/a	100	100	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
45	jumlah pengadaan gedung kantor/ bangunan lainnya				N/a	N/a	11	6	6	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
46	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				N/a	N/a	9	0	1	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
47	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				N/a	N/a	100%	100%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
48	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi				N/a	N/a	12	12	12	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
49	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum				N/a	N/a	12	12	12	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
50	Jumlah penyediaan benda pos				N/a	N/a	0	0	0	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
51	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				N/a	N/a	100	100	100	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
52	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				N/a	N/a	18	18	18	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
53	2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.				N/a	N/a	18	18	18	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
54	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya kec. Jogoroto yang dipelihara				N/a	N/a	5	1	4	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
55	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				N/a	N/a	15	1	4	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
56	Nilai Paten Kecamatan				N/a	N/a	84,00	84,50	85	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
67	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar				N/a	N/a	100	100	100	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
58	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/a	N/a	100	100	100	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
59	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/a	N/a	100	100	100	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
60	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/a	N/a	100%	100%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
61	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA				N/a	N/a	3	3	3	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
62	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/a	N/a	3	3	3	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
63	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/a	N/a	100	100	100	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
64	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum				N/a	N/a	12	12	12	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
65	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/a	N/a	12	12	12	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
66	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/a	N/a	100%	100%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
67	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/a	N/a	100%	100%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
68	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/a	N/a	22	22	22	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
69	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/a	N/a	22	22	22	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
70	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/a	N/a	100%	100%	100%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
71	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				N/a	N/a	22	22	22	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
72	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu				N/a	N/a	22	22	22	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
73	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/a	N/a	22	22	22	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
74	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa				N/a	N/a	22	22	22	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
75	2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan				N/a	N/a	11	11	11	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
76	3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan				N/a	N/a	11	11	11	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a					
77	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran				100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
78	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	Prosentase Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
80	Prosentase Fasiltasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023

[illegible]

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	1.350.000	300.000	8.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1311,11	N/A
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	2.673.332.748	2.743.980.748	2.723.920.748	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,96	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	2.672.232.748	2.672.232.748	2.673.332.748	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,02	N/A
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A		71.598.000	71.598.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	1.100.000	150.000	3.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1073,48	N/A
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A			15.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A			15.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	84.091.500	20.606.800	176.481.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	340,46	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	11.856.000	8.476.800	24.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77,31	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	50.820.000	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	9.557.500	3.285.000	14.841.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	143,08	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	3.381.000	4.440.000	4.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,34	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	7.679.000	2.905.000	30.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	435,27	N/A
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	798.000	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	43,98	N/A
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	33.648.000	17.768.000	20.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-17,32	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	33.648.000	17.768.000	20.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-17,32	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	113.316.000	69.550.000	66.228.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-21,70	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	19.200.000	15.750.000	19.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,97	N/A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	94.116.000	53.800.000	47.028.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-27,71	N/A
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	56.206.000	48.685.000	95.983.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41,88	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	40.140.000	38.160.000	41.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,25	N/A
	N/A	N/A	-			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	8.816.000	4.515.000	50.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	479,32	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	7.250.000	6.010.000	4.983.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-17,10	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	10.000.000	3.030.000	N/A	N/A	N/A	10.000.000	3.029.782	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	-69,70	- 69,7
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	8.800.000		N/A	N/A	N/A	8.800.000		N/A	N/A	N/A	100		N/A	N/A	N/A	100,00	- 100,0
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD	22.900.000	9.385.900	N/A	N/A	N/A	22.900.000	9.385.900	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	59,01	- 59,0
Penyusunan rencana strategis SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	14.000.000	7.299.900	N/A	N/A	N/A	14.000.000	7.299.900	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	47,86	- 47,9
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	7.200.000	1.636.000	N/A	N/A	N/A	7.200.000	1.636.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	77,28	- 77,3
Penyusunan laporan keuangan SKPD	1.700.000	450.000	N/A	N/A	N/A	1.700.000	450.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	73,53	- 73,5
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	0 141.900.00	71.087.000	N/A	N/A	N/A	141.900.000	71.087.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	49,90	- 49,9
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertertiban Umum	17.650.000	10.626.000	N/A	N/A	N/A	17.650.000	10.626.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	39,80	- 39,8
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41.050.000	28.536.000	N/A	N/A	N/A	41.050.000	28.536.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	-30,48	-30,5

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	25.000.000	9.314.000	N/A	N/A	N/A	25.000.000	9.314.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	-62,74	-62,7
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	58.200.000	22.611.000	N/A	N/A	N/A	58.200.000	22.611.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	-22,09	-20,2
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	3.213.994.94 9	2.441.662.77 3	N/A	N/A	N/A	2.387.774.58 7	2.301.616 .326	N/A	N/A	N/A	74,3	94,3	N/A	-24	-4
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	9.883.000	2.022.000	N/A	N/A	N/A	9.883.000	2.022.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-80	-80
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	9.283.000	1.722.000	N/A	N/A	N/A	9.283.000	1.722.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-81	-81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	600.000	300.000	N/A	N/A	N/A	600.000	300.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-50	-50
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	2.694.350.44 9	2.184.410.97 3	N/A	N/A	N/A	1.870.525.09 6	2.046.743 .097	N/A	N/A	N/A	69,4	93,7	N/A	-19	9
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	2.693.450.44 9	2.112.662.97 3	N/A	N/A	N/A	1.869.625.09 6	1.974.995 .097	N/A	N/A	N/A	69,4	93,5	N/A	-22	6
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	71.598.000	N/A	N/A	N/A	N/A	71.598.00 0	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	900.000	150.000	N/A	N/A	N/A	900.000	150.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-83	-83
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	4.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.800.000	N/A	N/A	N/A		100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	4.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.800.000	N/A	N/A	N/A		100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	86.023.500	23.474.800	N/A	N/A	N/A	86.021.100	23.474.800	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-73	-73
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	12.359.500	10.390.800	N/A	N/A	N/A	12.359.500	10.390.800	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-16	-16
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	43.520.000	N/A	N/A	N/A	N/A	43.520.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	9.557.500	3.285.000	N/A	N/A	N/A	9.557.500	3.285.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-66	-66
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	1.500.000	4.440.000	N/A	N/A	N/A	1.498.600	4.440.000	N/A	N/A	N/A	99.9	100	N/A	196	196
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	17.888.500	3.859.000	N/A	N/A	N/A	17.887.500	3.285.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-78	-82

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	1.198.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	1.198.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	25	25
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	264.573.000	32.768.000	N/A	N/A	N/A	262.448.600	32.768.000	N/A	N/A	N/A	99,2	100	N/A	-88	-88
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	200.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	197.875.600	N/A	N/A	N/A	N/A	98,9	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	64.573.000	32.768.000	N/A	N/A	N/A	64.573.000	32.768.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-49	-49
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	103.359.000	63.262.000	N/A	N/A	N/A	103.141.491	63.064.379	N/A	N/A	N/A	99,8	99,7	N/A	-39	-39
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	13.896.000	15.750.000	N/A	N/A	N/A	13.753.491	15.553.523	N/A	N/A	N/A	99,0	98,8	N/A	13	13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	89.463.000	47.512.000	N/A	N/A	N/A	89.388.000	47.510.856	N/A	N/A	N/A	99,9	100	N/A	-47	-47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	55.806.000	130.925.000	N/A	N/A	N/A	55.755.300	128.744.050	N/A	N/A	N/A	99,9	98,3	N/A	135	131

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	39.463.000	27.500.000	N/A	N/A	N/A	39.689.300	26.921.80 0	N/A	N/A	N/A	99,9	97,9	N/A	-30	-32
	N/A	N/A	-		N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	8.816.000	75.015.000	N/A	N/A	N/A	8.816.000	73.412.25 0	N/A	N/A	N/A	100	97,9	N/A	751	733
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	7.250.000	28.410.000	N/A	N/A	N/A	7.250.000	28.410.00 0	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	292	292
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	15.150.000	5.760.000	N/A	N/A	N/A	15.150.000	5.760.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-62	-62
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	15.150.000	5.760.000	N/A	N/A	N/A	15.150.000	5.760.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-62	-62
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	15.150.000	5.760.000	N/A	N/A	N/A	15.150.000	5.760.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-62	-62
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	13.300.000	3.200.000	N/A	N/A	N/A	13.300.000	2.950.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-76	-78
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	13.300.000	3.200.000	N/A	N/A	N/A	13.300.000	2.950.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-76	-78

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan: Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A	N/A	13.300.000	2.700.000	N/A	N/A	N/A	13.300.000	2.700.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-80	-80
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	250.000	N/A	N/A	N/A		250.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	10.625.000	3.720.000	N/A	N/A	N/A	10.625.000	3.720.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-65	-65
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	10.625.000	3.720.000	N/A	N/A	N/A	10.625.000	3.720.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-65	-65
Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	10.625.000	3.720.000	N/A	N/A	N/A	10.625.000	3.720.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-65	-65
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	8.550.000	9.450.000	N/A	N/A	N/A	8.550.000	9.450.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	11	11
Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	8.550.000	9.450.000	N/A	N/A	N/A	8.550.000	9.450.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	11	11

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	N/A	8.550.000	9.450.000	N/A	N/A	N/A	8.550.000	9.450.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	11	11
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	27.850.000	124.211.00 0	N/A	N/A	N/A	27.850.000	124.195.0 00	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	346	346
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	27.850.000	124.211.000	N/A	N/A	N/A	27.850.000	124.195.0 00	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	346	346
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	N/A	N/A	27.850.000	124.211.000	N/A	N/A	N/A	27.850.000	124.195.0 00	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	346	346
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	N/A	N/A	2.897.305.5 76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	6.265.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	5.390.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	875.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	2.670.263.576	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	2.597.265.576	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	71.598.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	1.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	78.817.050	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	15.003.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	43.890.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	7.290.050	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	2.220.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	7.414.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	N/A	N/A	3.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	19.334.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	19.334.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	72.496.950	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	N/A	20.190.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	52.306.950	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	N/A	N/A	30.104.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	9.145.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	10.880.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	6.225.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	6.225.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	6.225.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	36.575.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	36.575.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	N/A	24.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	12.245.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	10.975.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	10.975.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	N/A	10.975.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	10.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	10.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	10.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	35.510.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	35.510.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	35.510.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan yang signifikan kepada instansi pemerintah daerah, salah satu yang mengalami perubahan adalah kecamatan. Kedudukan camat berubah dari sebelumnya camat berperan sebagai kepala wilayah beralih menjadi perangkat daerah. Selain kecamatan, desa juga mengalami perubahan akibat pelaksanaan otonomi daerah. Desa setelah pelaksanaan otonomi dapat memiliki otonominya sendiri dan bebas mengatur pemerintahannya sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Perubahan status dan kedudukan camat dan desa juga membawa perubahan terhadap hubungan kerja yang terjalin antara camat dengan kepala desa. Hubungan camat dengan kepala desa yang sebelumnya berupa hubungan yang bersifat hierarkis berubah menjadi hubungan kerja yang bersifat fasilitatif, koordinatif, hubungan kerjasama dan pembinaan dan pengawasan.

Desa yang merupakan kelompok sasaran layanan kecamatan, dalam hal ini kecamatan berperan sebagai fasilitator yang sesuai dengan pasal 98 ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, meliputi:

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa
5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa

7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
10. Memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga
13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan
14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Selain desa, kelompok penerima layanan kecamatan adalah Masyarakat, dalam Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat meliputi;

1. Pelayanan bidang perizinan
2. Pelayanan bidang non perizinan

Pedoman pelayanan kecamatan kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dalam pasal 4 PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.1 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, mitra Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan di wilayah Kecamatan adalah Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komandan Komando Rayon Militer (Koramil) yang terbentuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Forkopimcam menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN
JOGOROTO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Seiring dengan perkembangan kebijakan yang terjadi pada tahun 2016 dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang wajib menyusun dokumen perencanaan melalui proses perencanaan yang memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta *bottom up* dan *top down*.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jogoroto selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatasnya jumlah aparatur sipil di Kecamatan Jogoroto yang mempengaruhi efisiensi pelayanan.	Jumlah personil ASN di Kecamatan Jogoroto hanya 15 pegawai
		Kompetensi personil aparatur pelayanan yang masih rendah teknis tertentu	Minimnya diklat dan pembinaan yang mengikutsertakan para personil Kecamatan

2.	Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan	Sarana dan Prasarana pelayanan PATEN Kecamatan Jogoroto belum memenuhi kriteria Zona Integritas (ZI)
3.	Pelayanan	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.	Masyarakat yang semakin kritis mengharapkan pelayanan harus menerapkan prinsip <i>good governance</i>
4.	Rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tupoksi kecamatan	Belum ada sistem informasi yang dapat di akses oleh seluruh Desa / masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan di Kecamatan

3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Jogoroto dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Jogoroto adalah sarana bermain anak yang memadai, area parkir yang aman dan nyaman dan kantin pelayanan.

2. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Karena kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan RKPDes

3. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

Desa dalam menyusun laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes di susun dan dilaporkan ke kecamatan paling lambat 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

5. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Jogoroto karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai

Dari deskripsi permasalahan-permasalahan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah “Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan”.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jogoroto

Bahwasanya Tujuan dan sasaran Kecamatan Jogoroto mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal.

Tujuan yang akan diwujudkan adalah *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.*

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Jogoroto beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jogoroto

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	61,9	62,00	62,1
		1. Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	72	73	74
			Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	62,00	63,45	65,00
		2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Jogoroto		8,33	8,43

4.2 Cascading Kinerja

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah, dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Cascading Renstra Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Cascading Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kab. Jombang Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASAR	PROGRAM	INDIKATOR PROGR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Jogoroto	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OR SASAR	PROGRAM	INDIKATOR PRO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
												2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
											2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jogoroto	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
												2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
												3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
												4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARA	PROGRAM	INDIKATOR PROGR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													Disediakan
												5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
												6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
										Pengadaan barang Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
												2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
												3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
												2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
												3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Jogoro	Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Jogoroto	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
								Program Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanak an	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
									Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasi kan dengan instansi terkait	Koordinasi/S inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
								Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

TUJU AN RP	INDIKA TOR TUJUA N RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/ Ba dan Usaha dan Pemberdayaa n Masyarakat Desa yang dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan
											Jumlah Desa yang menyusun RKPDDes	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	Jumlah lembaga kemasyaraka tan yang berpartisipas i dalam forum musyawarah perencanaan pembanguna n di Desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Kecamatan sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah: Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pelayanan Umum serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.

1. Peluang

- a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima.
- b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan
- c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi Kecamatan
- d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RTRW.

2. Ancaman

- a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat

- b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan
- c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan
- d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.

3. Kekuatan

- a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan
- b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum
- c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencana pembangunan kawasan industri non polutan
- d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.

4. Kelemahan

-
- a. ~~Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan~~ perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan.
 - b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.
 - c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
 - d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan.
 - e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.

IFAS EFAS <u>Peluang (Opportunities) :</u> a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan	<u>Kekuatan (Strengths) :</u> a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencana pembangunan kawasan industri non polutan d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya. <u>Strategi SO</u> 1) Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel 2) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima	<u>Kelemahan (Weaknesses) :</u> a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan. b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan. e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. <u>Strategi WO</u> 1) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 2) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
---	---	--

prima. b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi Kecamatan d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RTRW.	3) Pendidikan dan pelatihan ntuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur 4) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 5) Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan 6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.	3) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 4) Peningkatan partisipasi aparatur Kecamatan dalam kegiatan keagamaan.
---	--	---

<u>Ancaman (Threats) :</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan	1) Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran. 2) Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintahan Kecamatan 3) Mengoptimalkan kinerja pelaksanan kegiatan Pemerintah Kecamatan 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalamproses perencanaan dan penyelenggaran pembangunan Kecamatan 5) Meningkatkan jangkauan informasi	1) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 2) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 3) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 4) Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan.

c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.	potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat 6) Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat 7) Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat 8) Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan.	
--	---	--

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan, adapun strategi Kecamatan yaitu :

1. Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan
4. Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan
6. Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat
7. Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat
8. Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan yaitu :

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan
2. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ
3. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif
4. Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)
5. Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan
7. Optimalisasi penyajian data dan informasi

Rumusan sasaran, strategi,dan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN RPD: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kecamatan	- Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan - Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan - Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan - Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan - Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat - Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat	- Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan - Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif - Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product) - Sosialisasi dan optimalisasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan
		- Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima. Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.	- Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ - Optimalisasi penyajian data dan informasi
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	instansi pemerintah		

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, tertanggal 23 Juni 2023 mengharuskan adanya Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pemutakhiran dilakukan melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri Bersama dengan Kementerian/ Lembaga terkait berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam bentuk verifikasi, validasi, dan inventarisasi oleh **Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur** untuk selanjutnya **ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.**

Perubahan Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai

tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jogoroto adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Indikator, sasaran dan rencana pencapaian program dan kegiatan tersaji dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah Kecamatan Jogoroto Kab. Jombang Tahun
2024-2026 Sebelum Pemutakhiran.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT	
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	N/A	100	3.019.130.000	100	3.112.679.000	100	3.360.763.600	100	9.492.572.	CAMAT	KECAMATAN JOGOROTO

			7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100	6.892.000	100	7.585.000	100	9.009.300	100	90.09.300	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGOROT
			7.01.0 1.2.01. 01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	N/A	3	5.840.000	2	6.525.000	3	7.178.000	7	19.543.000	KEPALA SUB BAGIA N KEUAN GAN, PENYU SUNAN PROGR AM DAN EVALU ASI	KECAM ATAN JOGOROT

			7.01.0 1.2.01. 06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	N/A	5	963.000	5	1.060.000	5	1.059.300	15	3.082.300	KEPALA SUB BAGIA N KEUAN GAN, PENYU SUNAN PROGR AM DAN EVALU ASI	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencaiaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	%	N/A	100	2.750.000 .000	100	2.800.000 .000	100	3.025.000.000	100	8.575.000.0 00	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGORO
					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100		100		100		100	-	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.02. 01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	oran g/bu l a n	N/A	17	2.750.000 .000	17	2.800.000 .000	17	3.025.000.000	51	8.575.000.0 00	KEPALA SUB BAGIA N KEUAN GAN, PENYU SUNAN PROGR	KECAM ATAN JOGORO

																AM DAN EVALU ASI	
			7.01.0 1.2.02. 03	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	12	78.800.000	12	86.680.000	12	86.680.000	36	252.160.000	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMATAN JOGOROTO
			7.01.0 1.2.02. 05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	1.540.000	1	1.694.000	1	1.865.000	1	5.099.000	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMATAN JOGOROTO

			7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jogoroto	%	N/ A	100	5.700.000	100	5.700.000	100	5.700.000	100	13.300.000	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGORO TO
			7.01.0 1.2.05. 02	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	pak et	N/ A	19	5.700.000	19	5.700.000	19	5.700.000	38	13.300.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO TO
			7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	N/ A	100	86.751.000	100	95.523.00 0	100	97.203.100	100	97.203.100	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.06. 01	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	pak et	N/ A	8	3.300.000	8	3.630.000	8	3.630.000	8	10.560.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO

			7.01.0 1.2.06. 02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	paket	N/A	21	16.600.000	21	18.260.000	21	18.260.000	21	53.120.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.06. 04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pa	N/A	1	48.279.000	1	53.200.000	1	53.106.900	1	154.585.900	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.06. 05	4. Penyediaan Barang Cetakn Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang	paket	N/A	2	7.970.000	2	8.767.000	2	9.645.000	2	26.382.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO

			7.01.0 1.2.06. 06	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Do ku me	N/ A	1	2.442.000	1	2.690.000	1	2.686.200	1	7.818.200	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGOROT
			7.01.0 1.2.06. 09	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	La po ra n	N/ A	4	8.160.000	4	8.976.000	4	9.875.000	4	4	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGOROT
			7.01.0 1.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	9	N/ A	100	30.000.000	100	50.000.00 0	100	70.000.00 0	100	270.000.000	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGOROT
			7.01.0 1.2.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	N/ A	0	-	0	-	0	-	0	0	KEPALA SUB BAGIA N UMUM	KECAM ATAN JOGOROT

																DAN KEPEG AWAIA N	
			7.01.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Un it	N/A	6	30.000.000	4	50.000.000	6	70.000.00 0	16	150.000.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGOR
			7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	N/A	100	79.809.000	100	87.860.000	100	87.789.90 0	100	255.458.900	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGOR
			7.01.0 1.2.08. 02	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	la po ra n	N/A	24	22.209.000	24	24.500.000	24	24.429.90 0	24	71.138.900	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGOR

			7.01.0 1.2.08. 04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	N / A	12	57.600.000	12	63.360.000	12	63.360.00 0	12	184.320.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N / A	100	55.268.000	100	60.830.000	100	60.794.80 0	100	60.794.800	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.09. 02	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Un it	N / A	9	33.200.000	9	36.520.000	9	36.520.00 0	27	106.240.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO

			7.01.0 1.2.09. 09	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	un it	N/A	2	10.100.000	2	11.110.000	2	11.110.00 0	6	32.320.000	Kasubag Umum	
			7.01.0 1.2.09. 10	3. Rehabilita dan Gedung atau Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Un it	N/A	8	11.968.000	8	13.200.000	8	13.164.80 0	8	13.164.800	Kasubag Umum	
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan	7.01.0 1.2.09. 09	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	unit	N/A	2	10.100.000	2	11.110.000	2	11.110.00 0	6	32.320.000	Kasubag Umum	
			7.01.0 2	Program Penyelen Pemerint Pelayanan	Nilai Paten Kecamatan	Nil	N/A	85	6.900.000	86	7.590.000	86	7.590.000	86	22.080.000	Camat	

			7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	%	N	100	6.900.000	100	7.590.000	100	7.590.000	100	22.080. 000	KEPALA SEKSI TATA PEMERI NTAHA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 2.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan (laporan admindu k, perijinan, dan non perijinan tiap bulanan)	N / A	12	6.900.000	12	7.590.000	12	7.590.000	12	22.080. 000	KEPALA SEKSI TATA PEMERI NTAHA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	%	N / A	100	33.495.000	100	36.849.000	100	41.186.00 0	100	41.186. 000	CAMAT	KECAM ATAN JOGORO

					Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	%	N / A	100		100		100		100	-	CAMAT	KECAMATAN JOGOROTO
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	laporan	N / A	5	33.495.000	5	36.849.000	5	41.186.000	15	111.530.000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN JOGORO
					Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	dokumen	N / A	4		4		4		4		KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN JOGORO
			7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang (tidak hanya PHBN harus ada aktivitas pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa)	N / A	100	26.840.000	100	29.524.000	100	32.480.000	100	88.844.000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN JOGORO

			7.01.0 5.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	N/A	4	6.655.000	4	7.325.000	4	8.706.000	4	22.686.000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN JOGOROTO
			7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	%	N/A	100	12.075.000	100	14.613.500	100	14.615.000	100	41.303.500	CAMAT	KECAMATAN JOGORO
			7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	%	N/A	100	12.075.000	100	13.285.000	100	14.615.000	100	39.975.000	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN JOGORO

			7.01.0 4.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Laporan	N/A	100	12.075.000	100	13.285.000	100	14.615.000	100	39.975.000	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN JOGORO TO
			7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	%	N/A	100	11.475.000	100	12.625.000	100	13.890.000	100	37.990.000	CAMAT	KECAMATAN JOGORO
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	desa	N/A	11	11.475.000	11	12.625.000	11	13.890.000	11	37.990.000	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMATAN JOGORO

			7.01.0 6.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen (LRA SMT 1 dan LRA Akhir tahun)	N/A	22	11.475.000	22	12.625.000	22	13.890.000	22	37.990.000	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMATAN JOGORO
			7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	%	N/A	100	45.000.000	100	49.500.000	100	49.500.000	100	155.275.000	CAMAT	KECAMATAN JOGORO
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Lembaga	N/A	4	30.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000	4	96.000.000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KECAMATAN JOGORO
					Jumlah Desa yang menyusun RKPDDes	Desa	N/A	13		13		13		13	-	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYA	KECAMATAN JOGORO

																RAKAT DESA	
			7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	N/A	4	30.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000	4	96.000.000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KECAMATAN JOGORO
			7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakatan (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu)	N/A	22	15.000.000	22	16.500.000	22	16.500.000	11	48.000.000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KECAMATAN JOGORO

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah Kecamatan Jogoroto Kab. Jombang Tahun
2024-2026 Setelah Pemutakhiran.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT	
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
								K	A	K	A	K	A	K	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	N/A	100	3.019.130.000	100	3.112.679.000	100	3.360.763.600	100	9.492.572.	CAMAT	KECAMATAN JOGOROTO

			7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100	6.892.000	100	7.585.000	100	9.009.300	100	90.09.300	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGOROT
			7.01.0 1.2.01. 0001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	N/A	3	5.840.000	2	6.525.000	3	7.178.000	7	19.543.000	KEPALA SUB BAGIA N KEUAN GAN, PENYU SUNAN PROGR AM DAN EVALU ASI	KECAM ATAN JOGOROT

			7.01.0 1.2.01. 0006	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	N/A	5	963.000	5	1.060.000	5	1.059.300	15	3.082.300	KEPALA SUB BAGIA N KEUAN GAN, PENYU SUNAN PROGR AM DAN EVALU ASI	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	%	N/A	100	2.750.000 .000	100	2.800.000 .000	100	3.025.000.000	100	8.575.000.0 00	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGORO
					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100		100		100		100	-	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.02. 01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	oran g/bu l a n	N/A	17	2.750.000 .000	17	2.800.000 .000	17	3.025.000.000	51	8.575.000.0 00	KEPALA SUB BAGIA N KEUAN GAN, PENYU SUNAN PROGR	KECAM ATAN JOGORO

																AM DAN EVALU ASI	
			7.01.0 1.2.02. 0003	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	12	78.800.000	12	86.680.000	12	86.680.000	36	252.160.000	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMATAN JOGOROTO
			7.01.0 1.2.02. 0005	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	1.540.000	1	1.694.000	1	1.865.000	1	5.099.000	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMATAN JOGOROTO

			7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jogoroto	%	N/ A	100	5.700.000	100	5.700.000	100	5.700.000	100	13.300.000	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGORO TO
			7.01.0 1.2.05. 0002	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	pak et	N/ A	19	5.700.000	19	5.700.000	19	5.700.000	38	13.300.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO TO
			7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	N/ A	100	86.751.000	100	95.523.00 0	100	97.203.100	100	97.203.100	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.06. 0001	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	pak et	N/ A	8	3.300.000	8	3.630.000	8	3.630.000	8	10.560.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO

			7.01.0 1.2.06. 0002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	paket	N/A	21	16.600.000	21	18.260.000	21	18.260.000	21	53.120.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.06. 0004	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pa	N/A	1	48.279.000	1	53.200.000	1	53.106.900	1	154.585.900	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.06. 0005	4. Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	paket	N/A	2	7.970.000	2	8.767.000	2	9.645.000	2	26.382.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO

			7.01.0 1.2.06. 0006	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Do ku me	N/ A	1	2.442.000	1	2.690.000	1	2.686.200	1	7.818.200	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGOROT
			7.01.0 1.2.06. 0009	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	La po ra n	N/ A	4	8.160.000	4	8.976.000	4	9.875.000	4	4	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGOROT
			7.01.0 1.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	9	N/ A	100	30.000.000	100	50.000.00 0	100	70.000.00 0	100	270.000.000	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGOROT
			7.01.0 1.2.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	N/ A	0	-	0	-	0	-	0	0	KEPALA SUB BAGIA N UMUM	KECAM ATAN JOGOROT

																DAN KEPEG AWAIA N	
			7.01.0 1.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Un it	N/A	6	30.000.000	4	50.000.000	6	70.000.00 0	16	150.000.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGOR
			7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	N/A	100	79.809.000	100	87.860.000	100	87.789.90 0	100	255.458.900	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGOR
			7.01.0 1.2.08. 0002	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	la po ra n	N/A	24	22.209.000	24	24.500.000	24	24.429.90 0	24	71.138.900	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGOR

			7.01.0 1.2.08. 0004	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	N / A	12	57.600.000	12	63.360.000	12	63.360.00 0	12	184.320.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N / A	100	55.268.000	100	60.830.000	100	60.794.80 0	100	60.794.800	SEKRET ARIS	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 1.2.09. 0002	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Un it	N / A	9	33.200.000	9	36.520.000	9	36.520.00 0	27	106.240.000	KEPALA SUB BAGIA N UMUM DAN KEPEG AWAIA N	KECAM ATAN JOGORO

			7.01.0 1.2.09. 0009	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	un it	N/A	2	10.100.000	2	11.110.000	2	11.110.00 0	6	32.320.000	Kasubag Umum	
			7.01.0 1.2.09. 0010	3. Rehabilita dan Gedung atau Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Un it	N/A	8	11.968.000	8	13.200.000	8	13.164.80 0	8	13.164.800	Kasubag Umum	
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan	7.01.0 1.2.09. 0009	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	unit	N/A	2	10.100.000	2	11.110.000	2	11.110.00 0	6	32.320.000	Kasubag Umum	
			7.01.0 2	Program Penyelen Pemerint Pelayanan	Nilai Paten Kecamatan	Nil	N/A	85	6.900.000	86	7.590.000	86	7.590.000	86	22.080.000	Camat	

			7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	%	N	100	6.900.000	100	7.590.000	100	7.590.000	100	22.080. 000	KEPALA SEKSI TATA PEMERI NTAHA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 2.2.02. 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan (laporan admindu k, perijinan, dan non perijinan tiap bulanan)	N / A	12	6.900.000	12	7.590.000	12	7.590.000	12	22.080. 000	KEPALA SEKSI TATA PEMERI NTAHA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	%	N / A	100	33.495.000	100	36.849.000	100	41.186.00 0	100	41.186. 000	CAMAT	KECAM ATAN JOGORO

					Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	%	N / A	100		100		100		100	-	CAMAT	KECAMATAN JOGOROTO
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	laporan	N / A	5	33.495.000	5	36.849.000	5	41.186.000	15	111.530.000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN JOGORO
					Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	dokumen	N / A	4		4		4		4		KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN JOGORO
			7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang (tidak hanya PHBN harus ada aktivitas pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa)	N / A	100	26.840.000	100	29.524.000	100	32.480.000	100	88.844.000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN JOGORO

			7.01.0 5.2.01. 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	N/A	4	6.655.000	4	7.325.000	4	8.706.000	4	22.686.000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMATAN JOGOROTO
			7.01.0 4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	%	N/A	100	12.075.000	100	14.613.500	100	14.615.000	100	41.303.500	CAMAT	KECAMATAN JOGOROTO
			7.01.0 4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	%	N/A	100	12.075.000	100	13.285.000	100	14.615.000	100	39.975.000	KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN JOGOROTO

			7.01.0 4.2.02. 0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Laporan	N/A	100	12.075.000	100	13.285.000	100	14.615.00 0	100	39.975. 000	KEPALA SEKSI KETENT RAMA N DAN KETERT IBAN UMUM	KECAM ATAN JOGORO TO
			7.01.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	%	N/A	100	11.475.000	100	12.625.000	100	13.890.00 0	100	37.990. 000	CAMAT	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	desa	N/A	11	11.475.000	11	12.625.000	11	13.890.00 0	11	37.990. 000	KEPALA SEKSI TATA PEMERI NTAHA N	KECAM ATAN JOGORO

			7.01.0 6.2.01. 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen (LRA SMT 1 dan LRA Akhir tahun)	N/A	22	11.475.000	22	12.625.000	22	13.890.000	22	37.990. 000	KEPALA SEKSI TATA PEMERI NTAHA N	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	%	N/A	100	45.000.000	100	49.500.0 00	100	49.500.0 00	100	155.2 75.00 0	CAMAT	KECAM ATAN JOGORO
			7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Lembaga	N/A	4	30.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000	4	96.000. 000	KEPALA SEKSI PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DESA	KECAM ATAN JOGORO
					Jumlah Desa yang menyusun RKPDDes	Desa	N/A	13		13		13		13	-	KEPALA SEKSI PEMBE RDAYA AN MASYA	KECAM ATAN JOGORO

																RAKAT DESA	
			7.01.0 3.2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	N/A	4	30.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000	4	96.000.000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KECAMATAN JOGORO
			7.01.0 3.2.01. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakatan (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu)	N/A	22	15.000.000	22	16.500.000	22	16.500.000	11	48.000.000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KECAMATAN JOGORO

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD, maka Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, baik pencapaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator hasil yang termuat dalam program-program yang akan dilaksanakan. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Jogoroto dengan pemerintah, dan Kecamatan Jogoroto akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Jogoroto yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	70,89	72	73	74	74
2.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Jogoroto	8,10	8,22	8,33	8,43	8,43
4.	Nilai Paten Kecamatan Jogoroto	84	86	86	87	87

5.	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	N/A	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	N/A	100%	100%	100%	100%

\

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jogoroto Tahun 2024 - 2026 merupakan tindak lanjut Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, tertanggal 23 Juni 2023 serta Berdasarkan hasil zoom oleh Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 20 Juni 2023, notifikasi pemutakhiran pada dashboard SIPD-RI serta rekomendasi hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagaimana lampiran Surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor: 050/10.745/201.2/2023 tanggal 22 Juni 2023 disebutkan bahwa: Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2024 dan SIPD sebagaimana tindaklanjut Radiogram Ditjen Bangda Kemendagri tanggal 19 Juni 2023 Nomor: 600.2.1/7230 tentang Diseminasi Permendagri tentang RKPD Tahun 2024

Untuk itu diperlukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang disusun sebagai dokumen Pengganti Renstra (2018-2023) yang telah berakhir sekaligus sebagai landasan pelaksanaan penyusunan RKPD dan Renja PD untuk tahun 2024-2026. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah, dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Oleh karena itu, dengan tersusunnya dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ini, diharapkan adanya keteraturan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat

mewujudkan sinergitas kinerja Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan pihak atau instansi terkait lainnya, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Renstra Perubahan Kecamatan Jogoroto akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jogoroto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Jogoroto wajib berpedoman pada dokumen Renstra. Dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra Kecamatan Jogoroto, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Jogoroto, 3 April 2023
CAMAT JOGOROTO



NUNIK HIDAYATI, ST
Pembina Tingkat Satu
NIP.196908141997032003